

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian dilaksanakan, simpulannya implementasi kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor masih berjalan kurang baik. Hal tersebut tertera dalam elemen dari kebijakan ini. Implementasi kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor di DKI Jakarta masih jauh dari sempurna sehingga memerlukan perkembangan dan perbaikan lebih lanjut agar dapat menjadi kebijakan yang ideal bagi masyarakat DKI Jakarta.

1. Kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor di DKI Jakarta masih dikatakan belum berjalan cukup baik. Ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui tentang kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta, walaupun memang rata – rata sudah mengetahui mengenai kebijakan uji emisi gas tersebut. Kurangnya informasi yang disosialisasikan ke masyarakat menjadi salah satu penyebab utama mengapa terdapat masyarakat yang bahkan belum mengetahui kebijakan uji emisi gas ini walaupun sudah berjalan selama 5 tahun. Selain itu diketahui bahwa tidak adanya apresiasi bagi para pegawai, walaupun memang jika dilihat merupakan kewajiban karyawan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tetapi adanya apresiasi menjadi sebuah pacuan bagi para pegawai khususnya dalam memberikan inovasi – inovasi terbaru yang dapat meningkatkan efektivitas dari kebijakan uji emisi gas. Kemudian diketahui bahwa Koordinasi dengan pemilik kios dilakukan melalui grup Whatsapp yang berisi seluruh pemilik kios ataupun bengkel uji emisi. Namun peneliti menemukan keluhan dari pemilik kios uji emisi terkadang informasi yang diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup masih belum jelas lalu ketika ada keluhan

ataupun pertanyaan tidak langsung di respon padahal didalam grup tersebut terdapat beberapa pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Komunikasi yang efektif tidak hanya melibatkan internal, tetapi juga harus mencakup interaksi dengan masyarakat sebagai penerima langsung kebijakan. Koordinasi dengan masyarakat diperlukan untuk memastikan pemahaman, partisipasi, dan dukungan mereka terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

2. Implementasi kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor di DKI Jakarta telah ditemukan faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan ini. Faktor pendukungnya antara lain dalam Dimensi sumberdaya terdapat sertifikasi dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pelatihan tersebut juga menjadi syarat ketika masyarakat ingin membuka kios uji emisi. DKI Jakarta sudah diintegrasikan dengan database yang dipunya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Ini merupakan langkah dilakukan untuk mengurangi kecurangan yang dapat terjadi. Selain itu, sumberdaya manusia yang dimiliki sudah berkompeten karena adanya pelatihan yang dilakukan bagi para teknisi sehingga dalam menjalankan mesin dan penerapan SOP dapat berjalan dengan baik. Yang kedua sumberdaya peralatan pun juga sudah sangat memadai mulai dari kios – kios uji emisi yang sudah banyak di wilayah DKI Jakarta. Kemudian dimensi karakteristik organisasi pelaksana yaitu dalam kebijakan uji emisi gas ini Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah memiliki karakteristik organisasi yang kuat dengan adanya inovasi – inovasi terbaru tiap tahunnya.

Sementara dalam dimensi sikap pelaksana, sikap positif dari pelaksana akan menjadikan dorongan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam implementasi kebijakan tersebut tetapi sikap yang negatif, seperti penolakan atau ketidakpedulian akan

menjadi hambatan yang serius dalam implementasi suatu kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup juga mengatur SOP bagi para teknisi uji emisi, jika melanggar SOP yang ditentukan maka teknisi akan dikenakan sanksi. Ini menjadi sebuah sikap dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam memberi cerminan ke masyarakat bahwa keseriusan dalam kebijakan uji emisi gas dapat terwujud.

Dari dimensi standar & sasaran kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan didalam kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta sudah spesifik dan konkrit. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan standar dan sasaran yang spesifik yang didasarkan Pergub DKI Jakarta No. 66 Tahun 2020 dan baku mutu emisi dari Permen KLHK Nomor 8 Tahun 2023. Dengan landasan hukum yang jelas, sasaran yang terukur, dan pendekatan berbasis sanksi sehingga kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta memiliki standar dan sasaran yang jelas.

Namun selain memiliki faktor pendukung, ditemukan pula faktor penghambat dari kebijakan ini antara lain seperti kurangnya rasa awarness kepada lingkungan dan juga sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada masyarakat. Kemudian adanya mayoritas masyarakat merasa keberatan pada biaya yang perlu dikeluarkan Rp.150.000 - Rp. 200.000 dalam kebijakan uji emisi tersebut. Dan ketika sedang ada pilpres ataupun pilkada kegiatan yang harusnya bisa dilakukan seperti sosialisasi menjadi tidak bisa dilaksanakan sehingga komunikasi kepada masyarakat menjadi terhambat. Dari sisi komunikasi dengan masyarakat didapati juga masih adanya kekurangan penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dari mayoritas masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta. Minimnya informasi khususnya di sosial media menjadi alasan utama.

4.2 Saran

Terdapat saran yang mampu dirumuskan oleh peneliti pada penelitian “Implementasi Kebijakan Uji Emisi Gas di Wilayah DKI Jakarta” yaitu sebagai berikut:

1. Dari dimensi kondisi sosial, ekonomi & politik diperlukan regulasi yang lebih tegas agar masyarakat semakin patuh dan pemerintah juga perlu turun langsung dalam meninjau apakah regulasi yang dibuat sudah berjalan semestinya atau belum. Dan pemerintah juga harus memberikan contoh dalam mematuhi regulasi yang dibuat. Pemerintah juga perlu membuat suatu event cek emisi gratis untuk beberapa warga sebagai langkah pengenalan pentingnya uji emisi gas kendaraan bermotor. karena dari segi faktor ekonomi khususnya dengan tarif yang dikenakan menjadi alasan utama pengguna kendaraan bermotor di DKI Jakarta masih minim untuk melaksanakan uji emisi gas kendaraan bermotor.
2. Dari dimensi komunikasi diperlukan penyebaran informasi terkait kebijakan uji emisi yang lebih kreatif dan tersebar ke Masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang belum pernah menerima informasi tentang kebijakan uji emisi gas di wilayah DKI Jakarta ini menandakan bahwa komunikasi kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Sehingga perlu adanya penyebaran informasi secara masif lagi baik itu secara offline ataupun melalui sosial media. Sosial media menjadi salah satu platfrom yang sangat cepat dalam penyebaran informasi sehingga pemerintah dapat memanfaatkannya dengan mengunggah video sosialisasi kreatif terkait kebijakan uji emisi ataupun grafis informasi sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui tentang kebijakan uji emisi ini sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat.